



**LAPORAN KINERJA (LKJ)  
TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Kabupaten Belitang Timur**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kegiatan tahun anggaran 2023 dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan berbagai faktor baik bersifat dukungan maupun yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam menjadikan Kabupaten Belitong Timur menjadi Belitong Timur Bangkit dan Berdaya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur bertanggungjawab untuk menyusun laporan kinerja Tahun Anggaran 2023, yang merupakan komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome, penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur yang merupakan evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun dapat menjadikan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen, keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
Kabupaten Belitong Timur,



**EVI NARDI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda /IVc  
NIP. 19681115 199603 1 002



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi .....	
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang .....	
1.2 Dasar Hukum .....	
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	
1.2.1 Tugas pokok dan fungsi Badan kesbangpol	
1.2.2 struktur organisasi Badan kesbangpol	
1.2.3 bagan struktur organisasi Badan kesbangpol	
1.4 Kepegawaian.....	
1.3.1 jumlah pegawai berdasarkan struktur organisasi	
1.3.2 jumlah pegawai berdasarkan golongan	
1.3.3 jumlah pegawai berdasarkan eselonisasi	
1.3.4 jumlah pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan	
1.3.5 jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian	
1.4 Sarana dan Prasarana .....	
1.6 Ruang Lingkup.....	
1.7 Teknik Pengumpulan Data .....	
<b>BAB II</b> <b>Perencanaan dan perjanjian kinerja.....</b>	
2.1 Perencanaan Kinerja.....	
2.1.1. Rencana Strategis	
2.1.1.1. Visi dan Misi.....	
2.1.1.2. tujuan dan sasaran.....	
2.1.1.3. strategi dan kebijakan.....	
2.1..1.4 keterkaitan visi ,misi, tujuan, sasaran dan rencana target indikator tahun 2021-2026	
2.1.2. Indikator Kinerja Utama .....	
2.1.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) .....	
2.2 Perjanjian Kinerja.....	
<b>BAB III</b> <b>Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan .....</b>	
3.1 Kerangka pengukuran kinerja.....	
3.2 Evaluasi kinerja.....	
3.3 Analisis capaian kinerja.....	
3.4 Akuntabilitas keuangan.....	
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam mencapai visi dan misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja dimaksud adalah merupakan rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah..

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur telah melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dengan dasar rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2023, dimana dalam pelaksanaannya banyak menghadapi permasalahan yang menjadi tantangan dalam mewujudkan keberhasilan mencapai hasil seperti target yang telah ditetapkan dalam perencanaannya.

Dengan selesainya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diatas, guna peningkatan kualitas maupun kuantitas program kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur untuk masa yang akan datang perlu disusun suatu laporan sebagai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang memuat segala keberhasilan, permasalahan dan Upaya penyelesaiannya atau kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur Tahun Anggaran 2023. Atas dasar tersebut, maka disusunlah laporan tahunan ini dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023.

## 1.2. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur adalah :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitong Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2008 Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitong Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2014 Nomor 19).
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114).
13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

### **1.3. Gambaran Umum Organisasi**

#### **1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Menurut Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur memiliki kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangannya adalah sebagai berikut:

##### **a. Tugas Pokok**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan Teknik dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

##### **b. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,

pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial di daerah;

- Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golonganlainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial di daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golonganlainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial di daerah;
- Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah dan;
- Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan.

### **1.3.2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur terdiri dari :

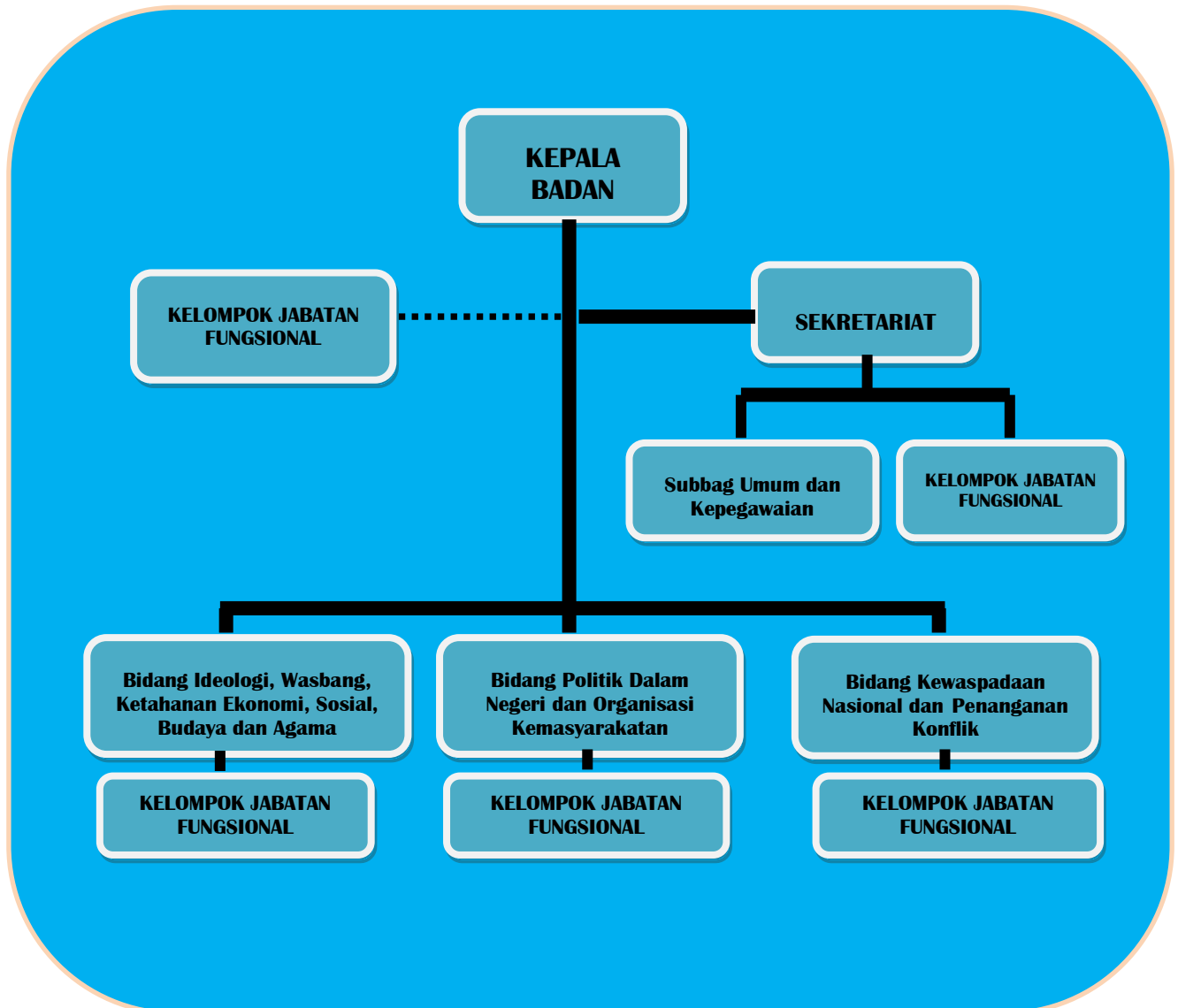
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
- e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

### **1.3.3. Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Adapun bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur adalah sebagai berikut :

Gambar. 1.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITONG TIMUR**







## 1.4. Kepegawaian

### 1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Unit Kerja	Jumlah	
		2022	2023
1	Kepala Badan	1	1
2	Sekretaris	0	0
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	11	11
4	Fungsional	1	1
5	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	3	3
6	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	2	3
7	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>22</b>

Sumber: Badan Kesbangpol, Tahun2023 berdasarkan penempatan pegawai

### 1.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Golongan	Jumlah	
		2022	2023
1	Golongan IV	1	3
2	Golongan III	4	5
3	Golongan II	3	3
4	Golongan I	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

Sumber: Badan Kesbangpol, Tahun2023

#### 1.4.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

**Tabel 1.3.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Eselon	Jumlah	
		2022	2023
1	Eselon II	0	1
2	Eselon III	1	3
3	Eselon IV	3	1
	JUMLAH	4	5

Sumber: Badan Kesbangpol, Tahun 2023

#### 1.4.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.4.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2022	2023
1	S3	-	-
2	S2	-	-
3	S1	8	8
4	D3	1	1
5	SMA	10	10
6	SMP	2	2
7	SD	1	1
	JUMLAH	22	22

Sumber: Badan Kesbangpol, Tahun 2023

#### 1.4.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2022	2023
1	PNS	10	11
2	Tenaga Kontrak	12	11
	JUMLAH	22	22

Sumber: Badan Kesbangpol, Tahun 2023

## 1.5. Sarana dan Prasarana Kerja

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2022	2023
1	Gedung Kantor	1	1
2	Rumah Dinas	-	-
3	Kendaraan Roda 4	3	3
4	Kendaraan Roda 2	7	7
5	Meja Kerja	29	29
6	Kursi Kerja	36	36
7	Laptop	8	10
8	Printer	14	16
9	Komputer/PC	11	13

## 1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 adalah:

1. Rencana Kinerja, berupa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.
3. Pengukuran Kinerja, meliputi:
  - a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.
  - b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2022.

## 1.7. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan pelaporan tentu membutuhkan Teknik pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga apa yang disajikan menjadi pelaporan yang kredible, akurat dan akuntabel. Dalam penyusunan laporan kinerja ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur menggunakan standard operasional prosedur (**SOP**) **Pengumpulan Data Kinerja** yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan (terlampir). SOP selanjutnya

menjadi acuan dalam pengumpulan data kinerja yang menggambarkan alur kerja dari produsen data yaitu sub bidang- sub bidang yang terlibat dalam menghasilkan data kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Kinerja**

##### **2.1.1. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur**

Perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Daerah perlu didukung oleh semua pihak terutama perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang diampu, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di bidang urusan kesatuan bangsa dan politik maka Badan kesatuan Bangsa dan Politik Menyusun program/kegiatan yang dituangkan dalam rencanas strategis badan tahun 2021-2026 yang menggambarkan titik akhir yang akan dituju.

##### **2.1.1.1 Visi dan Misi**

Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah tidak lagi mengusung Visi dan Misi sendiri melainkan mendukung Visi dan Misi dari Kepala Daerah terpilih. Maka Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun guna mendukung Visi dan Misi kepala daerah mewujudkan **Belitung Timur Bangkit dan Berdaya** yaitu misinya yang pertama yaitu Membenahi Manajemen Penyelenggaraan Ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.

##### **2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran**

Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur untuk mewujudkan **Visi dan Misi** melalui **Misi Pertama (M1)** Membenahi Manajemen Penyelenggaraan Ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum

Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik **Tujuan Pertama (T1)** Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien **sasaran keempat (S4)** Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu :

- **T1S4S1 Meningkatkan wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba** dapat dilihat dengan Tingkat persentase Masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba
- **T1S4S2 Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partaipolitik dan masyarakat** yang dapat di lihat dengan Tingkat persentase pemahaman Masyarakat tentang budaya politik.
- **T1S4S3 Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik** yang dapat dilihat dengan Tingkat persentase penanganan konflik secara damai.

Sebagai keterangan **T1** adalah Tujuan dari Visi Misi dan Kepala Daerah, **S4** merupakan sasaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah sedangkan **S1, S2 dan S3** merupakan sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### 2.1.1.3. Strategi dan Kebijakan

Keberhasilan suatu kerangka perencanaan juga membutuhkan strategi dan kebijakan yang matang agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai, maka untuk mewujudkan kerangka perencanaan di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memilih strategi yang dianggap sesuai dan tepat yaitu :

##### A. Strategi yang ada di bidang ideologi, wawasan kebangsaan

- 1) Memotivasi tokoh-tokoh Masyarakat untuk berperan sert dalam proses pembauran bangsa demi mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Fasilitasi peran serta Masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan jati diri bangsa yang menghargai bhineka Tunggal ika.
- 3) Membina dan mengembangkan harmonisasi heterogenitas Masyarakat sebagai potensi budaya daerah dan nasional guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Membina dan mengkoordinasikan tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba
- 5) Mensosialisasikan kepada seluruh Masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba
- 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelajar selaku generasi penerus bangsa

**B. Strategi yang ada di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan**

- 1) Mengedepankan fasilitasi dari pada regulasi bagi infrastruktur politik sebagai wahana penyalur aspirasi masyarakat
- 2) Mengayomi dan memberdayakan infrastruktur politik sebagai pilar demokrasi
- 3) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dalam semangat kemitraan kerja antara supra struktur dengan infra struktur politik
- 4) Mengembangkan pembinaan dinamika Masyarakat kearah kehidupan yang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat

**C. Strategi yang ada di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik**

- 1) Mengedepankan fasilitasi dari pada regulasi atas penyelesaian konflik yang mengarah pada sinergitas bangsa di daerah
- 2) Mempercepat dan memperluas jaringan komunikasi dan informasi untuk memacu penyelesaian konflik di daerah
- 3) Mempercepat jaringan informasi dan penyusunan data serta evaluasi perkembangan situasi konflik di daerah

**2.1.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra PD dengan RPJMD**

Tabel berikut menggambarkan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) :

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra PD dengan RPJMD**

**Visi :**  
**Misi I :** **Belitung Timur bangkit dan Berdaya**  
Membenahi Manajemen Penyelenggaraan Ketata pemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan Asas umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik

NO	TUJUAN				SASARAN						ARAH KEBIJAKAN				
	Tujuan OPD		Tujuan RPJMD		Sasaran OPD			Sasaran RPJMD							
1	1	1	Meningkatkan pemantapan ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, ideologi negara, hak asasi manusia, pembauran bangsa, dan kehidupan antar umat beragama	1	1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	1	1	1	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budayasehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	1	1	1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penataan Organisasi perangkat daerah dan Memotivasi tokoh-tokoh Masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembauran bangsa demi mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa.</li> <li>2) Fasilitasi peran serta Masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan jati diri bangsa yang menghargai bhineka Tunggal ika.</li> <li>3) Membina dan mengembangkan harmonisasi heterogenitas Masyarakat sebagai potensi budaya daerah dan nasional guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>4) Membina dan mengkoordinasikan tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika</li> <li>5) Mensosialisasikan kepada seluruh Masyarakat tentang bahaya penggunaan narkotika</li> <li>6) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelajar selaku generasi penerus bangsa</li> </ol>
2	1	2	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap hak dan kewajiban	1	1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	2	1	2	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai	1	1	1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengedepankan fasilitasi dari pada regulasi bagi infrastruktur politik sebagai wahana penyalur aspirasi masyarakat</li> <li>2) Mengayomi dan memberdayakan infrastruktur politik sebagai pilar demokrasi</li> <li>3) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dalam semangat kemitraankerjaantara supra struktur dengan infra struktur politik</li> </ol>



N O	TUJUAN				SASARAN						ARAH KEBIJAKAN				
	Tujuan OPD		Tujuan RPJMD		Sasaran OPD			Sasaran RPJMD							
			politik dalam proses demokrasi yang damai					politik dan masyarakat					4) Mengembangkan pembinaan dinamika masyarakat ke arah kehidupan yang memahamihak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat		
3	1	3	Meningkatkan pemahaman terhadap kewaspadaan dini serta menjaga keamanan dan keteriban untuk mencegah terjadinya konflik social di masyarakat	1	1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	3	1	3	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	1	1	1	]Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1) Mengedepankan fasilitasi dari pada regulasi atas penyelesaian konflik yang mengarah pada sinergitas bangsa di daerah 2) Mempercepat dan memperluas jaringan komunikasi dan informasi untuk memacu penyelesaian konflik di daerah 3) Mempercepat jaringan informasi dan penyusunan data serta evaluasi perkembangan situasi konflik di daerah



### 2.1.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur, bila dikaitkan dengan tujuan dan sasaran adalah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemantapan ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, ideologi negara, hak asasi manusia, pembauran bangsa dan kehidupan antar umat beragama	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya ehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Optimalisasi pembinaan demokrasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penataan Organisasi perangkat daerah dan Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembauran bangsa demi mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa.</li> <li>2) Fasilitas peran sertamasyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan jatidiri bangsa yang menghargai bhineka tunggalika.</li> <li>3) Membina dan mengembangkan harmonisasi heterogenitas masyarakat sebagai potensi budaya daerah dan nasional guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>4) Membina dan mengkoordinasi kantentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba</li> <li>5) Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang bahaya pengguna narkoba</li> <li>6) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelajar selaku generasi penerus bangsa</li> </ol>
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik dalam proses demokrasi yang damai	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partaipolitik dan masyarakat	Meningkatkan penataan pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil bermartabat dan taat hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengedepankan fasilitas dari pada regulasi bagi infrastruktur politik sebagai wahana penyalur aspirasi masyarakat</li> <li>2) Mengayomi dan memberdayakan infrastruktur politik sebagai pilar demokrasi</li> <li>3) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dalam semangat kemitraan kerja antara supra struktur dengan infra struktur politik</li> <li>4) Mengembangkan pembinaan inamika masyarakat ke arah kehidupan yang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat</li> </ol>



Meningkatkan pemahaman terhadap kewaspadaan ini sertamenjaga keamanan dan ketertiban untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah	1) Mengedepankan fasilitas dari pada regulasi atas penyelesaian konflik yang mengarah pada sinergitas bangsa di daerah 2) Mempercepat dan memperluas jaringan komunikasi dan informasi untuk memacu penyelesaian konflik di daerah 3) Mempercepat jaringan informasi dan penyusunan data serta evaluasi perkembangan situasi konflik di daerah
---	---	---	--

#### 2.1.1.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2016-2022

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun **2016-2022** dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2016-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan
					Tahun -1	Tahun -2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5	
1	Meningkatkan pemantapan ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, ideologi negara, hak asasi manusia, pembauran bangsa dan kehidupan antar umat beragama	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Tingkat persentase Masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan
					Tahun -1	Tahun -2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5	
2	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik dalam proses demokrasi yang damai	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Tingkat persentase pemahaman Masyarakat tentang budaya politik	4 kali	60%	60%	75%	75%	75%	75%
3	Meningkatkan pemahaman terhadap kewaspadaan dini serta menjaga keamanan dan ketertiban untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau istilahnya Key Performance Indicator adalah Tolak Ukur yang dipakai untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran dari suatu rencana strategis. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Indikator Kinerja Utama ini menjadi pedoman dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun. Indikator kinerja utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dalam Surat Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti berikut :

No.	SASARAN		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Unit Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket
	Sasaran Renstra OPD	Sasaran RPJMD					
1	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba Tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	Pemerintahan umum	Kesbangpol	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
2	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	Pemerintahan umum	Kesbangpol	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
3	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	Pemerintahan umum	Kesbangpol	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	



### 2.1.3. Rencana kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Merupakan Penjabaran dari Renstra, yang memuat seluruh rencana dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam tahun berjalan dan merupakan proses kerja dalam satu tahun dengan tolak ukur kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) guna menunjang proses akuntabilitas kinerja. Rencana Kinerja Tahunan juga merupakan implikasi dari Rencana Kerja Lima Tahunan yang dijabarkan pada Rencana Kerja Tahunan dimana pada Badan Kesatuan bangsa dan Poltik dapat Dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatkan pemantapan ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, ideologi negara, hak asasi manusia, pembauran bangsa, dan kehidupan antar umat beragama	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnyabudaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Tingkat persentase Masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	100%	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1.673.810.300,00</b>
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	147.923.000,00
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.395.489.500,00
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	130.397.800,00
				<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan PelaksanaanBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>672.907.950,00</b>
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	112.909.000,00
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90.762.000,00



Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	365.212.000,00
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	104.024.950,00
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik dalam proses demokrasi yang damai	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Tingkat persentase pemahaman Masyarakat tentang budaya politik	70%	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>12.497.816.650,00</b>
				Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	11.935.921.000,00
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	205.590.950,00
				Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	55.325.600,00
				Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	138.870.300,00



Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	162.108.800,00
				<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>184.647.000,00</b>
				Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	34.242.800,00
				Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60.507.200,00
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	89.897.000,00
Meningkatkan pemahaman terhadap kewaspadaan dini serta menjaga keamanan dan keteriban untuk mencegah terjadinya konflik social di masyarakat	Terwujudnya kapabilitas aparaturnya dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	100%	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	3.817.273.000,00
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.853.318.000,00
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	216.475.000,00
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	41.464.000,00





Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
				Daerah	
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	141.750.000,00
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	564.266.000,00



## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan komitmen dari penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan disertai dengan indikator kinerja yang menjadi tolak ukur dari penilaian komitmen tersebut. Dengan adanya Perjanjian kinerja ini maka akan ada komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara pemberi dan penerima Amanah atas kinerja terukur melalui tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya manusia dan anggaran yang telah disetujui. Perjanjian Kinerja juga mencakup dampak (outcome) dari program dan kegiatan atau kinerja tahun-tahun sebelumnya yang merupakan kesinambungan kinerja selama periode tahun perencanaan lima tahunan. Berikut tabel yang menyajikan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sesuai dengan rumusan Rencana Strategis yang dirumuskan guna mendukung keberhasilan RPJMD Kabupaten Belitang Timur:

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
	SASARAN RENSTRA OPD	SASARAN RPJMD yang diacu		
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat persentase Masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	100%
2	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partaipolitik dan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budayapolitik	70%
3	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	100%



➤ Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya sarana prasarana penunjang kinerja, kebutuhan administrasi, dan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas dan kompeten	Tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	100%
2	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	100%
3	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	60%
4	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 3.240.729.230	APBD II
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Rp. 1.668.876.300	APBD II
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Rp. 2.279.868.900	APBD II
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Rp. 184.647.000	APBD II
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;	Rp. 672.907.950	APBD II
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan	Rp. 3.817.273.000	APBD II



Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

➤ Perjanjian Kinerja Perubahan, sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 3.348.942.530	APBD II
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Rp. 1.673.810.300	APBD II
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Rp. 12.497.816.650	APBD II
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Rp. 184.647.000	APBD II
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;	Rp. 672.907.950	APBD II
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.	Rp. 3.817.273.000	APBD II

Pada Tahun 2023 Perjanjian Kinerja mengalami perubahan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula Rp. 3.240.729.230 menjadi Rp.3.348.942.530 pada Perjanjian Kinerja Perubahan dimana terdapat beberapa kegiatan pada pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Begitu juga perubahan pada Program Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang semula Rp. 3.817.273.000 menjadi Rp. 12.497.816.650 pada Perjanjian Kinerja Perubahan. Hal ini dikarenakan ada pembiayaan untuk Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang tahapannya dimulai pada Bulan November Tahun 2023.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

##### 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan& RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Kategori, Nilai, dan Interpretasi Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

No.	Kategori	Nilai	Interprestasi	Kode Warna
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	
2	A	>80-90	Memuaskan	
3	BB	>70-80	Sangat Baik	
4	B	>60-70	Baik	
5	CC	>50-60	Cukup	
6	C	>30-50	Kurang	
7	D	0-30	Sangat Kurang	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, Renstra dan IKU badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengalami perubahan seiring dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026, hasil dari kajian dan evaluasi terhadap Renstra tahun 2021-2026 setelah menyesuaikan dengan perubahan RPJMD dimaksud, maka renstra mengalami perubahan agar lebih SMART (Spesific, Measureable, Achieveable,

Relevant, Time-bound) agar pengukuran kinerja lebih optimal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran yaitu :

Sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran ;

Sasaran 2 terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran ;

Sasaran 3 terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran.

Secara terinci capaian sasaran terlihat seperti pada tabel 3.2, Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

**Tabel 3.2. Evaluasi Pengukuran Kinerja  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023
1	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Tingkat persentase Masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	100%
3	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Tingkat persentase pemahaman Masyarakat tentang budaya politik	70%
5	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	100%

### 3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran melalui pengumpulan data pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang.

Secara rinci persentase capaian indikator sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	Tingkat persentase Masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	%	90-100	100/A	100
2	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Tingkat persentase pemahaman Masyarakat tentangbudaya politik	%	60 - 70	70 /B	100
3	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam hal penyelesaian konflik	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	%	90-100	100/A	100

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja(LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya Solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitung Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Sasaran 1 : 1.1.1 Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba**

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.1 Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini tidak dapat dilaksanakan sekali saja tetapi harus berkesinambungan dan jika memungkinkan sampai ketingkat sekolah dasar sehingga pengenalan dini tentang wawasan dan karakter kebangsaan sudah tertanam. Indikator ini diwujudkan dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, dengan realisasi indikator sasaran pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100% maka capaian kinerja indikator ini pada tahun 2023 yaitu

$$\frac{\text{Realisasi tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} = \frac{100\%}{100\%} = 100\%$$

Dengan **Predikat Sangat Memuaskan**. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.1.1. Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	Persen	100	100	100	100	100	100

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penjelasan

Indikator ini bertujuan meningkatkan pemantapan ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, Ideologi Negara, Hak asasi manusia, Pembangunan Bangsa dan kehidupan antar umat beragama sehingga tidak ada lagi konflik di Tengah Masyarakat baik secara vertikal maupun masyarakat. Yang perwujudannya dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub



kegiatan dengan besar anggaran sebesar **Rp. 1.673.810.300,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.479.384.000,00** atau capaian realisasi sebesar **88,38 %** dengan capaian kinerja sebesar **100%**.

Adapun kedua program tersebut yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dengan Karakter Kebangsaan (terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan) dan program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan). Selain yang bersifat formil kegiatan rutin pelaksanaan, kegiatannya juga mencakup :

#### **A. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan**

kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan ini untuk para generasi muda supaya selalu menanamkan nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa dan berwawasan kebangsaan sehingga generasi muda dalam mencapai tujuan dan cita-cita sesuai dengan adat aturan serta etika yang berlaku dimasyarakat. Pada kegiatan ini mengangkat tema "Bangkit Bergerak Bersama Pancasila" dimana kegiatan ini mengingatkan kembali kepada generasi muda untuk selalu menanamkan nilai-nilai kebangsaan agar tidak pernah pudar yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 13 Juli 2023 dan 18 Juli 2023 dengan sasaran pelajar SMA/SMK di Kecamatan Manggar sebanyak 100 (seratus) Pelajar.



#### **B. Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menyelenggarakan pembinaan bagi masyarakat di Kecamatan Damar untuk memberikan wawasan tentang Upaya menciptakan kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat yang di hadiri tokoh agama, pemuda, perangkat desa dengan harapan :

- Seluruh perangkat desa beserta tokoh agama, tokoh adat dan Masyarakat saling bersinergi menjaga kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama.

- Perlunya Kerjasama antar semua pihak untuk menangkal potensi penyebaran paham radikalisme di masyarakat.
- Untuk perangkat desa agar lebih aktif dalam memberikan pengarahan kepada Masyarakat terutama para pelajar agar terhindar dan tidak terpengaruh oleh konflik tentang agama.

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2023 dengan peserta terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat sebanyak 60 (enam puluh) Orang.



### C. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama dengan BNNK Kabupaten Belitong dan Polres Belitong Timur mengadakan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba. Pada kegiatan ini BNNK Kabupaten Belitong dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

mengambil tema Desa Bersih Narkoba (Bersinar), guna mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dengan menetapkan Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur sebagai Desa Bersih Narkoba Tahun 2023. Maksud dan tujuan diadakannya Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Belitong Timur adalah :

- Meningkatkan pengetahuan kepada Masyarakat terutama yang ada dilingkungan Pemerintah Desa akan bahaya narkotika
- Menumbuhkan kesadaran kepada generasi muda khususnya pelajar akan pentingnya hidup sehat tanpa narkoba.

Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 s.d 28 Juli 2023 di Kantor Desa Lalang dengan sasaran perangkat desa, dan masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melaksanakan pemantauan Bersama pihak berwajib dalam mengawasi pergerakan peredaran narkoba di tangan-tengah masyarakat. Dengan sasaran pencegahan yaitu tempat-tempat hiburan malam yang berada di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Gantung.



#### D. Kegiatan Paskibraka

Merupakan agenda rutin tahunan penyelenggaraan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia guna menumbuh kembangkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Persiapan kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) bulan dengan penetapan jumlah peserta hasil seleksi sebanyak 32 (tiga puluh dua) pelajar.

#### E. Kegiatan Festival Kebangsaan



Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk festival yang merangkul sejumlah perwakilan baik itu pelayar, Masyarakat, tokoh adat, perwakilan suku-suku bangsa. Dilaksanakan bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Belitong Timur yaitu pada tanggal 27 Januari 2023 yang dilaksanakan di lapangan bola Yagor selama 3 (tiga) hari.

Tujuannya adalah untuk menggiatkan hal-hal positif bagi kalangan remaja dengan menyalurkan hobi dan bakat di bidang kesenian, mensosialisasikan kepada Masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan antar suku serta mensosialisasikan pentingnya menghindari hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba.

b. Analisis Peningkatan/penurunan Kinerja

Indikator sasaran ini memiliki capaian kinerja 100% sama seperti tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yang diasumsikan berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan data sub kegiatan yang sudah terlaksana. Kegiatan ini berjalan dengan baik dengan realisasi fisik 100%, dimana output dari sub kegiatan terlaksana dengan optimal.

Tabel berikut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2023 Tingkat capaian kinerja sasaran disajikan berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 1.1.1 Tahun 2023**

No	Sub Kegiatan	Unsur Keterwakilan / Kelompok Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Ketua Paguyuban selaku Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	12	12	100%
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kerbangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Pelajar	32	32	100%
3	Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kerbangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Pelajar	50	50	100%
4	Sub Kegiatan Penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Karang Taruna Desa, Masyarakat,	50	50	100%



No	Sub Kegiatan	Unsur Keterwakilan / Kelompok Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Perangkat Desa			
5	Sub kegiatan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, social budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Perangkat Desa	50	50	100%
6	Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, social budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah	Masyarakat, Pemuda	1000	1000	100%
7	Sub kegiatan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, social budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah	ASN	12	12	100%

Keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran merupakan masalah utama dan klasik dalam pelaksanaan indikator ini, dimana pada sub bidang yang melaksanakan kewenangan ini hanya memiliki 3 orang saja dengan rincian 2 orang ASN dan 1 orang pegawai tenaga kontrak yang diperbantukan dari sub bagian umum dan kepegawaian. dan juga membutuhkan dukungan anggaran yang besar karena untuk membangun manusianya tidak cukup dengan sekali kegiatan saja tetapi butuh literasi dan sosialisasi yang berkesinambungan.

c. Solusi

Kekurangan Sumber Daya Aparatur dapat diatasi dengan sistem kerja gotong royong, Dimana kegiatan tidak lagi tersekat oleh sub bidang atau unit organisasi pengampu, melainkan dikerjakan secara Bersama-sama dengan sub bidang pengam punya sebagai penanggungjawab kegiatan tersebut sehingga tetap dapat dipantau agar dapat berjalan dengan baik, Sementara untuk anggarannya sebahagian memakai anggaran dari sekretaria

tatau kegiatan rutin bahkan sebahagian tanpa anggaran atau non budgeter akan tetapi diupayakan tidak mengurang imutu dan hasil yang ditargetkan.

Melihat dari urgensi kebutuhannya Dimana indiaktor sasaran ini juga merupakan objek vital untuk membumikan Pancasila di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sehingga tercipta persatuan dimana Pancasila sebagai perekat kebangsaanya dengan menciptakan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila.

### Sasaran2 : 2.2.1 Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat

Salah satu fungsi partai adalah memperjuangkan kepentingan publik melalui kebijakan public untuk kepentingan Bersama, dalam proses ini ada dua hal yang diperjuangkan partai politik; yaitu pertama, melakukan dialog secara intensif dengan Masyarakat untuk mengetahui publik. Anggota DPRD mewujudkan hal ini dengan melakukan kunjungan kerja dan kegiatan survey opini publik, kedua; Isu publik yang diangkat dalam pembahasan parlemen hingga menjadi Keputusan politik. Maka untuk menghasilkan suatu Keputusan publik dan dibutuhkan keterikatan antara pemih dan yang dipilih dalam hal ini perwakilan di Dewan atau sering disebut dengan DPRD.

Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5.**  
**Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1. Tahun 2023**

No	IndikatorSasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	Persen	60	60	100	70	70	100

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penjelasan

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2.2.1 Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan Masyarakat dengan 1 (satu) Indikator Sasaran dengan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 70% dari target yang ditetapkan sebesar 70% atau dengan kata lain kinerja pada tahun 2023 yaitu sebesar :

$$\frac{\text{Realisasi tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} = \frac{70\%}{70\%} = 100\%$$

Didasari dari hasil pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023, Indikator ini bertujuan Meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik dalam proses demokrasi yang damai dengan terselenggaranya pendidikan politik yang dilaksanakan oleh setiap partai politik yang ada di Kabupaten Belitong Timur dengan melaksanakan 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 12.682.463.650,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.586.031.001,00 dengan kata lain capaian realisasi sebesar 99,23 % sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 100% berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Bimbingan teknis pelaporan pertanggungjawaban hibah partai politik

Dilaksanakan pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan dihadiri oleh pengurus partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Belitong Timur yaitu sebanyak 10 partai pada bulan Februari tahun 2023, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dan narasumbernya dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Kegiatan ini bertujuan agar partai politik yang menerima dana hibah dapat memberikan laporan pertanggungjawaban yang lebih akuntabel sehingga dapat meningkatnya trust / kepercayaan dari konstituennya dengan harapan Tingkat partisipasi Masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi semakin meningkat dan membentuk hubungan erat antara pemilih dan yang terpilih sebagai wakil.



- Verifikasi hibah bantuan partai politik

Berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Belitong Timur, sebesar Rp. 15.000,- per suara sah dengan rincian sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45-285 Tahun 2023 tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 tanggal 1 April 2023 yaitu sebesar Rp. 907.965.000,- dengan besaran nilai untuk masing-masing parpol sesuai dengan jumlah suara sah dan kursi yang diperoleh pada pemilihan legislatif.



Disamping itu juga mendata atau verifikasi partai politik yang baru dibentuk di Kabupaten Belitong Timur pada Tahun 2023, daftar partai politik yang ada di Kabupaten Belitong ada sebanyak 18 (delapan belas) partai politik.



- Verifikasi Organisasi Masyarakat

Verifikasi dan pendataan organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung Timur sebagai Upaya dalam penertiban administrasi dokumen keabsahan organisasi secara peraturan dan perundang-undangan.

**Data Jumlah Organisasi Yang dibentuk di Kabupaten Belitung Timur  
s/d Bulan Desember Tahun 2023**

No	Kecamatan	Keterangan		
		Terdaftar	Terdata	Jumlah
1	Manggar	8	16	24
2	Kelapa Kampit	3	-	3
3	Simpang Renggiang	2	-	2
4	Damar	3	-	3
5	Gantung	7	-	7
6	Dendang	2	-	2
	<b>Jumlah</b>	25	16	41

**Data Jumlah Organisasi Yang Terdata dan Terdaftar  
di Kabupaten Belitung Timur s/d Bulan Desember Tahun 2023**

No	Kecamatan	Keterangan*		
		Terdaftar Pusat/Cabang	Terdata Pusat/Cabang	Jumlah
1	Manggar	62	13	75
2	Kelapa Kampit	5	-	5
3	Simpang Renggiang	2	-	2
4	Damar	5	2	7
5	Gantung	11	8	19
6	Dendang	2	-	2
	<b>Jumlah</b>	87	23	110

Pada kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak 110 organisasi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur dengan sebanyak 41 organisasi masyarakat diantaranya dibentuk di Kabupaten Belitung Timur dengan rincian 25 Organisasi telah terdaftar sedangkan 16 organisasi masih bersifat terdata karena belum mendaftarkannya.

## b. Analisis Peningkatan/penurunan Kinerja

Indikator sasaran ini memiliki capaian kinerja 100% sama seperti tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang diasumsikan berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan data sub kegiatan yang sudah terlaksana kegiatan ini berjalan dengan baik dengan realisasi fisik 100%, dimana output dari sub kegiatan terlaksana dengan optimal.

**Tabel 3.6**  
**Tingkat capaian kinerja sasaran 2.2.1 Tahun 2023**

No	Kegiatan	Unsur Keterwakilan / Kelompok Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Sub Kegiatan penyusunan program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Instansi/Lembaga	4	4	100%
2	Sub Kegiatan penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Ketua dan kader partai politik	30	30	100%
3	Pelaksanaan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Parpol	10	10	100%
4	Pelaksanaan koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perwakilan Parpol	22	22	100%
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,	Stakeholder	15	15	100%



	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
6	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, LSM, OKP	60	60	100%
7	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas	10	10	100%

Pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami banyak kendala, akan tetapi perlu peningkatan untuk tahun-tahun berikutnya terutama dalam fasilitasi bagi pemilih pemula agar lebih memahami sistem demokrasi dan mengenal calon wakil yang akan dipilih agar menghasilkan suatu pesta demokrasi yang lebih mengutamakan kredibilitas dan kompetensi.

a. Solusi

Dari table diatas dapat kita lihat pada tahun 2023 pendidikan politik sudah sangat baik untuk itu perlu dipertahankan dan di sosialisasikan guna mewujudkan masyarakat di Kabupaten Belitong Timur yang cerdas dalam berdemokrasi dan mengeluarkan pendapat, maka untuk itu diharapkan dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah sehingga bisa meningkatkan target dan capaian kinerja yang lebih baik lagi dan kegiatan tersebut dapat terselenggara pada tahun depan, terutama dalam hal dukungan anggaran dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)nya. Kemudian untuk kegiatan organisasi Masyarakat semoga ditahun selanjutnya bisa di terselenggara tanpa adanya pengurangan dari segi anggaran.

**Sasaran : 3.3.1 Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini**

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3.3.1 **Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini** dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2023 sebesar 100% dengan rumusan :

**Tabel 3.7. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja  
Sasaran 2.2.1. Tahun 2023**

No	IndikatorSasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal	Persen	100	100	100	100	100	100

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Penjelasan

Indikator ini bertujuan untuk Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kewaspadaan Dini Serta Menjaga Kamanan dan Ketertiban Untuk MencegahTerjadinya Konflik Sosial di Masyarakat dengan pembinaan dan deteksi dini konflik sara di daerah dengan melaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan serta 3 (tiga) sub kegiatan. Total anggaran mencapai sebesar Rp. 652.666.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp435.947.202,00 atau capaian sebesar 66,79%. Sedangkan realisasi fisiknya mencapai diasumsikan 100% karena tidak adanya gangguan keamanan atau konflik sosial /sara ditengah-tengah Masyarakat Kabupaten Belitong Timur dengan berbagai aktfitas atau kegiatan seperti :

- Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor : 188.45-223 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing Tahun 2022 tanggal 10 Maret 2023 yang melibatkan unsur vertikal dan lintas sektor yang memiliki

kewenangan di bidang hukum, keamanan, imigrasi unit penyelenggara Pelabuhan sebagai pintu masuk kedatangan.

**Tabel Data Orang Asing atau Tenaga Kerja Asing Tahun 2022  
Pada Kabupaten Belitang Timur**

NO.	NAMA PT	NEGARA ASAL	JUMLAH
1	PT. TOMMY UTAMA	CHINA	1
2	PT. STEELINDO WAHANA PERKASA	MALAYSIA	6
		TAIWAN	1
3	PT. PARIT SEMBADA	MALAYSIA	2
4	PT. SURYA MAS BELTIM INDO MAKMUR	CHINA	5
5	PT. MENARA CIPTA MULIA	MALAYSIA	1
6	PT. DAMAR MINERAL INDOTAMA	CHINA	1
7	PT. INDO MAKMUR ALAM RAYA	CHINA	2
JUMLAH TOTAL			19

Ada sebanyak 19 orang tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Belitang Timur berdasarkan data yang ada.

- Forum Kewaspadaan

Pembentukan forum dengan membentuk TIM Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Belitang Timur sesuai Surat Keputusan Bupati Belitang Timur Nomor : 188.45-273 TAHUN 2023 tanggal 30 Maret 2023 langsung dibawah pengarahannya dari Bupati Belitang Timur melibatkan unsur intelijen sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk kewaspadaan dini dengan mengawasi, mengumpulkan informasi, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan untuk mendeteksi secara dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Belitang Timur yang mengancam stabilitas Nasional.

- Penanganan Konflik Sosial

Pembentukan Tim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitang Timur Nomor : 188.45-272 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Belitang Timur sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang secara teknis langsung dibawah pengarahannya Bupati dan Wakil Bupati Belitang Timur yang melibatkan instansi vertikal dengan tujuan mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi efektifitas penanganan konflik social di Kabupaten Belitang Timur. Tim juga melaksanakan pemetaan, pemantauan, merespon secara cepat dan mengambil Tindakan yang dibutuhkan secara responsive terhadap gejala atau terjadinya gangguan keamanan.

## b. Analisis Peningkatan/penurunan Kinerja

Adapun peningkatan persentase capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 ini adalah karena didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang ditunjukkan dengan Tingkat partisipasi anggota yang tinggi, kondisi politik daerah yang kondusif serta penganggaran yang optimal. Peningkatan capaian kinerja yang tinggi harus pula ditunjang oleh kelengkapan ataupun sarana prasarana yang digunakan untuk kelancaran tugas dari para anggota Tim dilapangan, sehingga semua kegiatan yang ada bisa berjalan dengan aman dan lancar.

Tingkat capaian kinerja sasaran 3.3.1 Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Tingkat capaian kinerja sasaran 3.3.1 Tahun 2022**

No	Kegiatan	Unsur Keterwakilan / Kelompok Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	vertikal	1	1	100%
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Vertikal, opd	1	1	100%
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Vertikal, opd, Masyarakat	1	1	100%

Capaian kinerja yang dihasilkan akan optimal dengan koordinasi yang secara terus menerus baik dengan instansi vertikal maupun horizontal dan juga lintas sektor karena pengawasan membutuhkan jaringan yang luas agar dapat menjangkau titik terjauh bahkan wilayah yang sangat

sensitif karena anekaragam etnis, adat, budaya maupun karakteristik kewilayahan masyarakat yang ada di Kabupaten Belitong Timur.

c. Solusi

Melihat dari informasi pada poin a dan b di atas tergambar bahwa dukungan Pemerintah Daerah berbanding lurus dengan pencapaian target kinerja pemerintah pula. Untuk mencapai sasaran 3.3.1 yang optimal diharapkan dukungan anggaran yang optimal pula kepada Pemerintah Daerah bagi pembiayaan operasional dan pengadaan sarana penunjang kinerja anggota.

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2023 rencana program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitong Timur Belanja Daerah

Rincian alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitong Timur sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Rincian Alokasi Anggaran  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	<b>Belanja Daerah</b>	22.195.397.430,00	20.631.906.402,74	92,96
	<b>Belanja Operasi</b>	21.931.156.930,00	20.400.308.402,74	93,02
	a. Belanja Pegawai	1.576.595.230,00	1.224.075.339,00	77,64
	b. Belanja Barang dan Jasa	5.501.096.700,00	4.784.278.063,74	86,97
	c. Belanja Hibah	14.853.465.000,00	14.391.955.000,00	96,89
	<b>Belanja Modal</b>	264.240.500,00	231.598.000,00	87,65
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.270.500,00	40.050.000,00	55,42
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.970.000,00	191.548.000,00	99,78



Adapun alokasi anggaran untuk mendanai capaian sasaran sebagai berikut:

**Tabel 3.10** Alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk Mencapai Sasaran  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasional	21.931.156.930,00	20.400.308.402,74	93,02
2	Belanja Langsung Untuk Sasaran	17.024.944.950	16.279.957.812,00	95,62

Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel 3.20 berikut:

**Tabel 3.10**  
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Jml	Jml	Pagu Anggaran	Realisasi	%
		Prog	Sub Keg	(Rp)	Anggaran (Rp)	
1	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	2	7	1.673.810.300,00	1.479.384.000,00	88,38
2	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	2	8	12.497.816.650,00	12.417.912.612,00	99,36
3	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik	1	5	2.853.318.000,00	2.382.661.200,00	83,50
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>20</b>	<b>17.024.944.950</b>	<b>16.279.957.812,00</b>	<b>95,62</b>







**Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023**

Sasaran				Program dan Sub Kegiatan				Input (Rp)				
								Target	Realisasi	%		
Sasaran Renstra			Sasaran RPJMD									
2	1	1	Meningkatnya wawasan wawasan pengetahuan dan kesadaran kebangsaan dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	1	1	4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	1.673.810.300,00	1.479.384.000,00	<b>88,38</b>
								1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	147.923.000,00	135.979.200,00	91,93
								2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.395.489.500,00	1.308.374.800	93,76
								3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	130.397.800,00	35.030.000,00	26,86



2	2	1	Terwujudnyahubungan yang harmonisantara Lembaga perwakilan rakyat partaipolitik dan masyarakat	1	1	4	MeningkatnyaKualitasPenyelenggaraanPelayanan Publik	2	<b>Program Peningkatan Peran PartaiPolitik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika sertaBudayaPolitik</b>	12.497.816.650,00	12.417.912.612,00	99,36
								1	Penyusunan program kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sertaPemantauanSituasiPolitik Di Daerah	11.935.921.000,00	11.923.971.000,00	99,90
								2	Penyusunan bahan perumusan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sertaPemantauanSituasiPolitik di Daerah	205.590.950,00	148.349.200,00	72,16
								3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan	162.108.800,00	161.748.600,00	99,78



							Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
							4 Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	55.325.600,00	52.566.000,00	95,01
							5 Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	138.870.300,00	131.277.812,00	94,53
						<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	17.862.000,00	17.512.000,00	98,04
							1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	34.242.800,00	26.310.800,00	76,84
							2 Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60.507.200,00	53.135.589,00	87,82



1	1	1	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya budaya sehat yang jauh dari penyalahgunaan narkoba	1	1	4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya</b>	672.907.950,00	482.680.000,00	71,73
								1	Penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	112.909.000,00	90.315.000,00	79,99
								2	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90.762.000,00	0	0
								3	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	365.212.000,00	364.012.000,00	99,67
								4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	104.024.950,00	40.142.400	27,26
3	3	1	Terwujudnya kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam	1	1	2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	5	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	2.853.318.000,00	2.382.661.200,00	83,50
								1	Penyusunan program kerja di Bidang	2.853.318.000,00	2.382.661.200,00	83,50



penyelesaian konflik secara dini		Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	00	0	
	2	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	216.475.000,00	207.475.000,00	95,84
	3	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	41.464.000,00	40.166.000,00	96,87
	4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	141.750.000,00	137.250.000,00	96,83



---

Total	17.024.944.950,0 0	16.279.957.812,00	95,6 2
-------	-----------------------	-------------------	-----------

## BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public berdasarkan prinsip – prinsip tranparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya control dari Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja (LKJ) bertujuan untuk memberikan gambaran Tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan Tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitang Timur Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan.

KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. BELITUNG TIMUR,



**EVI NARDI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda /IVc  
NIP. 19681115 199603 1 002